

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Disusun oleh:
FITROTUSH SHOLIAH
B 200 160 206

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

FITROTUSH SHOLIAH

B200160206

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Dra. Rina Trisnawati., M.Si., Ph.D., Ak)

NIDN. 0624026901

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)**

Yang ditulis oleh:

FITROTUSH SHOLIAH




B200160206

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Sabtu 13 Februari 2021

Dewan Penguji:

1. Dra. Rina Trisnawati., M.Si., Ph.D., Ak ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin W. A., M.Si ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, MH., Ak ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin., M.M

NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah publikasi ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saaya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Februari 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' and 'S' intertwined, with a horizontal line crossing through them.

FITROTUSH SHOLIHAH

B 200 160 206

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, opini audit, dan temuan audit memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan program SPSS 21 untuk melakukan analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan dan opini audit memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap pusat.

Kata Kunci: kinerja pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan BPK.

ABSTRACT

This study aims to prove that the level of wealth, the level of dependence to the central government, capital expenditure, the audit opinion of BPK, and the audit finding of BPK are influential for performance of local governments of Indonesia in 2017. This research is quantitative research. The sampling method in this study is purposive sampling, samples can be chosen based on the availability of certain data and information. This research uses SPSS 21 software as the analysis program. The results showed that the level of wealth of local government and the audit opinions affect local government performance. While the level of dependence to the central government, capital expenditure, and audit findings has no effect on local government performance.

Keywords: local government's performance, local government's characteristics, results of examination by BPK.

1. PENDAHULUAN

Awalnya, pemerintah pusat mengatur seluruh program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Adanya keseragaman program yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak dapat terlaksana dengan baik karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga muncul tingkat kesenjangan antar daerah dan menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan daerah masing-masing dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain diberlakukan otonomi daerah, desentralisasi juga terjadi di Indonesia karena adanya perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan ini akan menyusun laporan keuangan selama satu periode yang akan ditujukan kepada pemerintah pusat, dimana isi dari laporan keuangan tersebut adalah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Laporan keuangan yang diserahkan akan dipantau dan dievaluasi untuk mengukur kinerja yang dicapai oleh suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009, evaluasi kinerja pemda secara sistematis diawali dengan proses pengumpulan data dan dianalisis menggunakan sistem pengukuran kinerja, dan salah satunya adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Hasil dari dilakukannya EKPPD berupa skor dan status kinerja daerah. Selain dilakukan evaluasi, pemerintah juga berkewajiban

untuk mewujudkan asas *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam bidang keuangan (Qowi dan Prabowo, 2017). Kewajiban ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara” pasal 31 ayat (1) yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan berisikan nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode. Banyaknya daerah di Indonesia menyebabkan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional tiap daerah berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain (Suhardjanto, 2010). Karakteristik ini merupakan komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa hal yang menjadi karakteristik pemerintah daerah yang terdapat dalam Rizal Qowi dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2017) antara lain tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan besarnya belanja modal daerah. Karakteristik tingkat kekayaan daerah dapat dinyatakan dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah. PAD merupakan bentuk hasil dari bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya di daerah tersebut.

Karakteristik tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2001). Pemerintah pusat

akan memantau pelaksanaan alokasi DAU setiap daerah agar kinerja pemerintah daerah meningkat.

Selanjutnya, karakteristik belanja modal daerah dilihat dari belanja modal dalam APBD. Belanja modal memiliki kaitan erat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Qowi dan Prabowo, 2017). Semakin besar jumlah belanja modal, menunjukkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pemerintah daerah melakukan pembangunan, maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan meningkat. Data PAD, DAU, dan belanja modal dapat dilihat dari APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dimuat dalam Laporan Realisasi APBD.

Laporan keuangan yang telah diserahkan akan diperiksa oleh BPK. Hasil akhir dari proses pemeriksaan atas laporan keuangan dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah daerah (Kusuma dan Kurniasih, 2017). Semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Temuan hasil audit yang akan digunakan yaitu ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan merupakan temuan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan (Qowi dan Prabowo, 2017). Ditemukannya jumlah temuan pemeriksaan BPK merupakan gambaran bagaimana kinerja pemerintah daerah. Semakin besar temuan yang ditemukan, semakin rendah kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal Qowi dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2017), yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada, (1) Tahun penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan data pada tahun 2012, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan data pada tahun 2017. (2) Adanya penambahan variabel independen yaitu Opini Audit.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)”**.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

2. METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana bertujuan sebagai penguji hipotesis, yaitu apakah variabel Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit, dan Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <http://www.djpk.depkeu.go.id>, Badan Pemeriksa Keuangan <http://www.bpk.go.id>, dan Kementerian Dalam Negeri <http://otda.kemendagri.go.id> yang terkait dengan variabel penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki Laporan Realisasi APBD.
3. Pemerintah daerah memiliki data skor kinerja yang tertera dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah daerah telah mendapat opini audit dan memiliki data jumlah temuan kepatuhan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2017). Karakteristik Pemerintah daerah pada penelitian ini antara lain yaitu Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, dan Belanja Modal. Hasil Pemeriksaan BPK pada penelitian ini antara lain yaitu Opini Audit dan Temuan Audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Maka sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah sebanyak 432 pemerintah daerah. Proses pemilihan sampel dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017	542
Kriteria Sampel:	
1. Pemerintah daerah setingkat provinsi	(34)
2. Kabupaten/kota yang tidak menyajikan laporan realisasi APBD secara lengkap periode tahun 2017	(0)
3. Kabupaten/kota yang tidak memiliki data skor kinerja periode tahun 2017	(19)
4. Kabupaten/kota yang tidak mendapat opini audit/temuan audit tidak disajikan secara lengkap periode tahun 2017	(2)
Jumlah sampel berdasarkan kriteria	487
Tahun pengamatan	1
Total Sampel	487
Data outlier	(55)
Total sampel penelitian	432

Sumber: Output SPSS, 2021

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *Central Limit Theorem* (CLT). Sesuai dengan pernyataan dalam model CLT, mayoritas ahli statistika menganggap model sampel yang diuji lebih dari satu atau sama dengan 30 ($n \geq 30$) sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati normal (Lind, *et.al*, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 432 sampel, sehingga distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Pada pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Jika nilai *tolerance* semua variabel bebas $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Tingkat Kekayaan Daerah	0,684	1,462	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Ketergantungan pada Pusat	0,684	1,461	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Belanja Modal	0,972	1,029	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Opini Audit	0,901	1,109	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Temuan Audit	0,949	1,054	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel III.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit, dan Temuan Audit tidak terjadi multikolinearitas.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Spearman Rho's*. Hasil Uji *Spearman Rho's* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Tingkat Kekayaan Daerah	0,080	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Ketergantungan pada Pusat	0,766	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,894	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Opini Audit	0,081	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Temuan Audit	0,929	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel III.2 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria *goodness of fit* atau tidak. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel III.3
Hasil Uji F

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig	Keterangan
Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit, Temuan Audit	66,054	2,41	0,000	Signifikan

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} $>$ F_{tabel} yaitu $66,054 > 2,24$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini merupakan *goodness of fit*. Hasil tersebut juga menjelaskan bahwa variabel Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit, dan Temuan Audit memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah secara bersama-sama.

3.4 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen secara parsial. Berikut tabel hasil uji t:

Tabel III.4
Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Tingkat Kekayaan Daerah	10,458	1,966	0,000	Berpengaruh
Tingkat Ketergantungan pada Pusat	1,737	1,966	0,083	Tidak Berpengaruh
Belanja Modal	-1,736	1,966	0,083	Tidak Berpengaruh
Opini Audit	10,768	1,966	0,000	Berpengaruh
Temuan Audit	-1,392	1,966	0,165	Tidak Berpengaruh

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel III.4 menunjukkan bahwa:

- Variabel Tingkat Kekayaan Daerah memiliki t_{hitung} sebesar 10,458 > 1,966 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_1 diterima, yang artinya bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pusat memiliki t_{hitung} sebesar 1,737 < 1,966 dan nilai signifikan sebesar 0,083 > 0,05, sehingga H_2 ditolak, yang artinya bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Variabel Belanja Modal memiliki t_{hitung} sebesar -1,736 < 1,966 dan nilai signifikan sebesar 0,083 > 0,05, sehingga H_3 ditolak, yang artinya bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Variabel Opini Audit memiliki t_{hitung} sebesar 10,768 > 1,966 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_4 diterima, yang artinya bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Variabel Temuan Audit memiliki t_{hitung} sebesar -1,392 < 1,966 dan nilai signifikan 0,165 > 0,05, sehingga H_5 ditolak, yang artinya bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

3.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil tabel uji koefisien determinasi:

Tabel III.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,661 ^a	0,437	0,430

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel III.5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dengan *Adjusted R²* yaitu sebesar 0,430. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit dan Temuan Audit dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 43% dan sisanya sebesar 57% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel III.6
Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig	Keterangan
Konstanta	2,454	26,168	0,000	
Tingkat Kekayaan Daerah	1,479	10,458	0,000	Berpengaruh
Tingkat Ketergantungan pada Pusat	0,235	1,737	0,083	Tidak Berpengaruh
Belanja Modal	-0,319	-1,736	0,083	Tidak Berpengaruh
Opini Audit	0,269	10,768	0,000	Berpengaruh
Temuan Audit	-0,471	-1,392	0,165	Tidak Berpengaruh
R ²	= 0,437		F _{hitung}	= 66,054
Adjusted R ²	= 0,430		Sig	= 0,000

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil tabel III.6, maka diperoleh analisis regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kinerja Pemerintah Daerah} = & 2,454 + 1,479 \text{ Tingkat Kekayaan Daerah} + \\ & 0,235 \text{ Tingkat Ketergantungan pada Pusat} \\ & - 0,319 \text{ Belanja Modal} + 0,269 \text{ Opini Audit} \\ & - 0,471 \text{ Temuan Audit} + e \end{aligned}$$

Berdasarkan model regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai Konstanta sebesar 2,454 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit dan Temuan Audit diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka nilai Kinerja Pemerintah Daerah akan naik sebesar 2,454.
- b) Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Kekayaan Daerah sebesar 1,479 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Tingkat Kekayaan Daerah tinggi atau naik sebesar satu satuan, maka kemungkinan nilai Kinerja Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 147,9%.
- c) Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Ketergantungan pada Pusat sebesar 0,235 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Tingkat Ketergantungan pada Pusat tinggi atau naik sebesar satu satuan, maka kemungkinan nilai Kinerja Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 23,5%.
- d) Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar -0,319 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Belanja Modal rendah atau turun sebesar satu satuan, maka kemungkinan nilai Kinerja Pemerintah Daerah juga akan mengalami penurunan sebesar 31,9%.
- e) Nilai koefisien regresi variabel Opini Audit sebesar 0,269 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Opini Audit tinggi atau naik sebesar satu satuan, maka kemungkinan nilai Kinerja Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 26,9%.

- f) Nilai koefisien regresi variabel Temuan Audit sebesar -0,471 dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Temuan Audit rendah atau turun sebesar satu satuan, maka kemungkinan nilai Kinerja Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 47,1%.

3.7 Pembahasan Hasil Analisis

1. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam tabel III.4 menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $10,458 > 1,966$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000. Sehingga dengan kata lain, hipotesis diterima.

Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka semakin baik kinerja daerah dalam mengembangkan daerahnya. PAD merupakan cerminan tingkat kekayaan daerah, dengan semakin besarnya nilai PAD yang dimiliki suatu daerah akan meningkatkan skor kinerja yang menunjukkan bahwa pemerintah semakin membaik dalam mengembangkan daerahnya dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah menjadi semakin membaik.

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Kurniasih (2017) serta Qowi dan Prabowo (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam tabel IV.5 menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,737 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,083. Sehingga dengan kata lain, hipotesis ditolak.

Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat, belum berarti semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan tingginya tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sehingga menyebabkan penilaian kinerja yang buruk dari pemerintah pusat. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat diduga lebih banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga pelaksanaan urusan pemerintah kurang memadai (Artha *et.al* (2015)).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha *et.al* (2015) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam tabel IV.5 menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,736 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,083. Sehingga dengan kata lain, hipotesis ditolak.

Hal tersebut berarti semakin besar belanja modal, belum berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah. Belanja modal dialokasikan

untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam membangun sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas publik. Namun, sarana dan prasarana publik yang disediakan oleh pemerintah daerah masih kurang memadai, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat. Besarnya jumlah belanja modal yang dialokasikan, tidak mencerminkan kemampuan belanja modal yang sesungguhnya, sehingga penilaian kinerja pemerintah daerah tidak optimal.

Dengan adanya penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha *et.al* (2015) serta Djuniar dan Zuraida (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam tabel IV.5 menunjukkan bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $10,768 > 1,966$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000. Sehingga dengan kata lain, hipotesis diterima.

Hal tersebut berarti semakin baik opini yang diberikan oleh BPK maka semakin baik pula kinerja pemerintah. Opini audit merupakan alat ukur dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang laporan keuangannya terkelola dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang beropini baik dan menjadi bukti bahwa kinerja pemerintah sudah cukup baik.

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Parwanto dan Harto (2017) serta Nurhayati *et.al* (2018) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam tabel IV.5 menunjukkan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,392 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,165. Sehingga dengan kata lain, hipotesis ditolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit temuan audit, belum berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah. Temuan audit merupakan kasus pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh BPK selama pemeriksaan dilakukan. Hasil temuan tersebut nantinya akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau urusan pemerintahan (Artha, *et.al* (2015)).

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha *et.al* (2015) serta Suheri *et.al* (2018) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $10,458 > 1,966$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000 sehingga **H_1 diterima.**
2. Tingkat Ketergantungan pada Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,737 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,083 sehingga **H_2 ditolak.**

3. Tingkat Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,736 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,083$ sehingga **H₃ ditolak**.
4. Tingkat Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $10,768 > 1,966$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,000$ sehingga **H₄ diterima**.
5. Tingkat Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-1,392 < 1,966$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,165$ sehingga **H₅ ditolak**.

4.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Menggunakan data skor kinerja yang lebih baru, agar lebih mencerminkan kondisi saat ini.
2. Menambahkan variabel lain yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tindak lanjut hasil pemeriksaan dan lain-lain.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu antara lain:

1. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2017, sehingga kurang mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini disebabkan karena data terbaru untuk skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri adalah tahun 2017.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah yaitu Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, Opini Audit, dan Temuan Audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Iim Nur; Afiah, Nunuy Nur, dan Pratama, Arie. 2019. "Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal 147-165. p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876.*
- Artha, Risma Diri; Basuki, Prayitno dan MT., Alamsyah. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB)". *Jurnal InFestasi Vol. 11, No. 2, Desember 2015 hal. 214-229.*
- Djuniar, Lis dan Zuraida, Ida. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan". *Volume 3, Nomor 2, November 2018.*
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kiswanto dan Fatmawati, Dian. 2019. "Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, *Leverage*, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya". *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, (1), 2019, 44-54. e2579-9991, p2579-9975.*
- Kusuma, Priyan Mardya dan Kurniasih, Lulus. 2017. "Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia". *EQUITY VOL. 20 NO. 1.*
- Laporan Realisasi APBD 2018.
- Noviyanti, Nur Ade dan Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016). ISSN 2252-6765.*

- Nurhayati, Netty; Rizani, Fahmi dan Kadir. 2019. “Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Jurnal InFestasi Vol. 15 No. 1 Juni 2019* hal 67-82.
- Parwanto, Endri dan Harto, Puji. 2017. “Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 1-9. ISSN (Online): 2337-3806*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02. Laporan Realisasi Anggaran.
- Qowi, Rizal dan Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu. 2017. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012”. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806*.
- Suheri; Cahyono, Yoyok dan Yunia, Dabella. 2018. “Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Banten: Perspektif Pendapatan Asli Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia”. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol. 11 No. 2, Oktober 2018* hal 276-292.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Wijaya, Anthonius H. Citra; Rante Andika dan Ramandey, Putri Inda. 2018. “Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 2, November 2018: 123-134.*